

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, adalah salah satu dari sederet presiden di kawasan Timur Tengah yang saat ini sedang dilanda gelombang revolusi. Sejarah mencatat bahwa tuntutan pergantian pemerintahan bukanlah hal yang baru di Suriah. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Suriah, tercatat setidaknya ada empat kali kudeta yang terjadi di Negara itu. Kudeta pertama dilakukan oleh Humsi Zaim atas pemerintahan presiden Shukri Al-Quwatly pada 30 Maret 1949. Kemudian Dilanjutkan dengan kudeta oleh Kolonel Sami Hinnawi pada 14 Agustus 1949 yang mengangkat Hashim Al-Atassi menjadi presiden sementara. Pada akhir desember 1949 Letnan Kolonel Adib Shishakli melakukan kudeta dan mengangkat seorang sipil, Khalid Al-Azeem, menjadi presiden¹. Pada tahun 1971 Hafeez Al-Assad melakukan kudeta dan berhasil menjadi presiden Suriah dan memerintah hingga tahun 2000.

Gelombang revolusi akhir-akhir ini mulai menjalar ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Terhitung sejak tahun 2010 yang lalu, gerakan perlawanan massa yang menggugat kepemimpinan para penguasa di kawasan tersebut mulai bermunculan dan mampu memaksa pemimpin mereka yang telah berkuasa puluhan tahun untuk turun tahta. Tunisia, Mesir dan Libya adalah

¹ George Lenczowski, *Timur Tengah Di Kancah Dunia Ed.3*, Terjemahan Asgar Bixby, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 1993, hal. 198-209

beberapa Negara yang mengalami gejolak reformasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dan menyebabkan pemimpin mereka mundur.

Revolusi Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan “Revolusi Melati” ini berawal dari aksi bakar diri Mohammed Bouzizi di Tunisia akibat ketimpangan sosial ekonomi dan berhasil menggulingkan presiden Tunisia Zein Al-Abidin Ben Ali mundur dari pemerintahan. Revolusi kemudian menjalar ke Mesir yang bermula dari aksi protes kepada pemerintah melalui sebuah laman facebook yang bernama “*We are all Khaled Said*” yang dibuat oleh aktivis muda yang bernama Ghonim.² Aksi ini diikuti oleh sekian banyak pemberontakan dan akhirnya berhasil membuat presiden Mohammad Hosni Said Mubarak mundur pada tanggal 11 Februari 2011. Aljazair, Bahrain, Yaman dan Libya pun akhirnya terkena dampak dari Revolusi ini.

Revolusi “Melati” ini seakan memberikan efek *domino* bagi negara-negara Arab. Suriah adalah salah satu negara yang sampai saat ini masih mengalami konflik internal akibat gejolak reformasi ini. Konflik ini bermula dari penolakan dan tuntutan mundur terhadap rezim yang berkuasa, Al-Assad, pembubaran pemerintahan yang berkuasa dan mengakhiri kekuasaan partai Baath yang telah berkuasa hampir lima puluh tahun. Protes keras yang dipimpin oleh Dewan Nasional Suriah sebagai pihak oposisi dari rezim yang berkuasa menggelar aksi demonstrasi sejak maret 2011 lalu dan memancing reaksi dari pemerintah. Dengan dibantu militer, pemerintah membubarkan paksa para demonstran yang menuntut turunnya Presiden Bashar Al-Assad dari Pemerintahan. Menurut PBB,

² Tamburaka Apriadi, *Revolusi Timur Tengah “kejatuhan Para Penguasa otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, Narasi press 2011, hal 75.

disinyalir lebih dari 8000 orang korban meninggal dunia dari aksi protes yang digelar di berbagai kota di Suriah sejak maret 2011 lalu.³

Pemicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di Suriah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara-negara Arab yang lain, yakni terkait dengan ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintahnya. Pemerintahan Al-Assad diduga melakukan tindakan korupsi dan cenderung memperkaya diri dan keluarganya sendiri di atas penderitaan rakyat. Ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat dan penguasa beserta kerabat-kerabatnya tampak jelas dan sangat dirasakan oleh rakyat. Awal mula terjadinya konflik yaitu di Kota bagian selatan Deraa, merembet ke Sanamein, Douma dan belasan kota lainnya.

Pada awalnya rakyat hanya menuntut reformasi politik dalam pemerintahan. Namun dalam perkembangannya pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menghadang aksi para demonstiran yang membuat korban berjatuhan. Tindakan pemerintah yang dinilai melanggar hak asasi manusia ini membuat rakyat semakin tidak puas dengan kinerja pemerintah dan menuntut agar presiden Bashar Al-Assad turun dari jabatannya. Warga sipil dan beberapa tentara yang membelot dari pemerintahan bersatu dan membentuk unit pertempuran dibawah bendera Tentara Kebebasan Suriah (*The Free Syrian Army*).

Masyarakat sipil yang melakukan aksi demo menentang pemerintahan Bashar sebenarnya hanya menginginkan adanya kesamaan hak, kebebasan, dan kehidupan yang aman. Mereka juga menuntut kebebasan bersuara dan negara demokrasi yang beradab. Sederet lembaga militer yang dipimpin oleh Bashar Al-

³ Annan: *Suriah Terima Proposal Damai PBB* diakses 26 April 2012, <http://English.umm.ac.id/id/internasional-umm-575-annan-suriah-terima-proposal-damai-pbb.html>

Assad, dan Menteri Dalam Negeri Suriah telah membunuh para demonstran yang tak berdosa sejak tanggal 15 Maret 2011. Hingga saat ini lebih dari 100.000 orang telah ditangkap dan dipenjarakan akibat aksi demonstrasi ini. Pasukan militer negara juga telah menangkap lebih dari 70.000 orang demonstran yang sebagian besar dari mereka adalah para aktivis kampus, guru, dokter, pengacara, para ulama, juga para cendekiawan yang pada umumnya masih berusia muda⁴.

Tindakan Pemerintah Suriah ini menarik perhatian dunia internasional. Dukungan dan kecaman pun diberikan kepada pemerintahan Al-Assad terkait masalah domestik di Suriah. Sejumlah negara dan organisasi-organisasi internasional pun turut serta dalam memberikan perhatian mereka terkait konflik ini. Lima Puluh negara yang tergabung dalam “*Friends of Syria*” mengadakan pertemuan di Tunisia dan mendesak presiden Bashar Al-Assad untuk mundur⁵. Uni Eropa ikut mengambil sikap terhadap pemerintah Suriah dengan memberlakukan larangan masuk ke wilayahnya bagi 13 pejabat Suriah dan membekukan asetnya di luar negeri serta melarang ekspor barang mewah dan membatasi penjualan barang ke Suriah.⁶ Perserikatan Bangsa-Bangsa pun ikut mendesak Bashar untuk melakukan gencatan senjata dan mengirim utusan yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan.

⁴ Ghiyast Abdul Baqi, 24 Oktober 2011, *Rakyat Suriah Terbantai dan Terbunuh, Berharap Bantuan Muslim Indonesia*, diakses 26 April 2012, <http://m.voa-islam.com/news/islamic-world/2011/10/24/16480>

⁵ Prayitno Ramlan : *Mengapa Amerika Tidak Menyerang Suriah*, diakses 27 April 2012, <http://hankam.kompasiana.com/2012/03/14/mengapa-amerika-tidak-menyering-suria/>

⁶ Muzaffar Salman, 23 April 2012, *Uni Eropa perketat Sanksi Terhadap Suriah*, diakses 27 April 2012, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/04/24/m2xy7k-uni-eropa-perketat-sanksi-terhadap-suria>

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang dengan lantang menentang tindakan represif pemerintah Suriah terhadap rakyatnya. Washington memblokir dan membekukan aset milik adik Assad, yakni Maher al-Assad, komandan Divisi Bersenjata Ke-4 militer Suriah. Sanksi sama dikenakan kepada beberapa pejabat puncak dan dinas intelijen Suriah. Selain membekukan aset, Presiden Barack Obama juga melarang transaksi finansial aset dengan para tokoh penting Suriah tersebut. Sanksi itu berlaku pula untuk Ali Mamluk, direktur Badan Intelijen Suriah; dan Atif Najib, mantan kepala intelijen di Provinsi Daraa, pusat unjuk rasa dan kekerasan politik. Kebijakan baru pemerintahan Obama itu melarang pula warga atau individu AS bertransaksi dengan pemerintah Suriah. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk seluruh entitas yang berasal dari AS. Washington telah berulang-ulang mendesak Assad untuk mengubah arah kebijakannya, proreformasi, serta mengizinkan warga Suriah mendapatkan hak-hak politik dan HAM mereka.

Negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab mengeluarkan kecaman terhadap aksi pemerintah Suriah yang dinilai telah melanggar hak asasi rakyatnya. Liga Arab memberikan tekanan kepada rezim Al-Assad untuk segera menghentikan aksi militernya terhadap para demonstran dan segera melakukan tindakan damai dengan cara musyawarah kepada pihak yang bertikai. Namun, menurut Liga Arab, rezim Al-Assad tidak mengindahkan seruan yang dikeluarkan kepadanya dan masih meneruskan tindakan kekerasan terhadap warganya.

Liga Arab telah memberikan peringatan dan himbauan kepada pemerintah Suriah untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri mereka dengan tidakan-

tindakan damai dan mengancam akan memberikan sanksi kepada Suriah jika himbauan yang telah mereka keluarkan tetap tidak digubris oleh Suriah. Sanksi-sanksi berupa pembekuan aset pemerintah Suriah di negara-negara Arab, penerapan zona larangan terbang bagi pesawat Suriah di negara-negara anggota Liga Arab, embargo Bank Sentral Suriah, dan pemutusan hubungan perdagangan antara Suriah dan negara-negara anggota Liga Arab.⁷

Liga Arab memberikan sanksi ini bukanlah dengan tidak memiliki alasan. Liga menilai bahwa konflik internal yang terjadi di Suriah tidak hanya berdampak pada kondisi politik dan ekonomi di negara itu, tetapi juga akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi politik dan ekonomi anggota Liga Arab yang lain mengingat Suriah adalah salah satu negara penggagas terbentuknya Liga dan memiliki peranan penting dalam perkembangan politik dan ekonomi. Liga Arab berusaha untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah agar tidak bertambah lagi korban yang tewas maupun terluka sehingga kondisi pemerintahan Suriah bisa berjalan stabil kembali.

Sanksi ini akhirnya resmi dikeluarkan Liga Arab dalam pertemuan di Kairo pada ahad 27 november 2011 setelah 19 dari 22 negara anggota Liga Arab meratifikasi draft sanksi tersebut karena Suriah dinilai telah menolak usulan Liga Arab untuk mengakhiri konflik berdarah di negara itu. Liga Arab juga telah mengusulkan kepada PBB untuk melakukan tindakan yang sama kepada Suriah agar mendesak pemerintah Suriah untuk menghentikan tindakan berdarahnya.

⁷ *Motif sanksi Liga Arab Terhadap Suriah*, http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/motif-sanksi-liga-arab-terhadap-suriah/pop_up, diakses pada tanggal 15 maret 2012.

Tindakan yang dilakukan oleh Liga Arab ini mendapat kecaman dari Presiden Bashar Al-Assad dan dinilai telah melanggar kode etik internasional. Perbuatan ini merupakan intervensi terhadap kedaulatan negara. Masalah internal Suriah, menurut Al-Assad, adalah masalah domestik yang tidak boleh dicampuri oleh pihak asing. Salah satu isi pidato Assad juga mengkritik keras Liga Arab serta elemen regional dan internasional yang dia sebut sebagai persekongkolan. Ini semakin memicu ketegangan hubungan antara Suriah dengan Liga Arab dan dunia internasional. "Presiden tidak boleh lari dari tantangan ini dan kami menghadapi tantangan nasional di Suriah. Namun kita tidak bisa terus menuntut dialog, sementara para teroris (oposisi bersenjata) itu membantai warga dan pasukan kita," tegasnya⁸.

Menurut penulis, hal ini menarik untuk dikaji melihat gaya kepemimpinan presiden Bashar Al-Assad yang cenderung enggan untuk patuh kepada intervensi asing yang memaksanya untuk melakukan perubahan rezim. Perilaku ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan gaya kepemimpinan Hosni Mubarak di Mesir dan mantan presiden Tunisia Zein Abidine Ben Ali yang cenderung mundur dan menyerah dengan intervensi asing. Presiden Bashar Al-Assad lebih memilih gaya mantan Presiden Libya, Moammar Khadafi untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Presiden Suriah Bashar al Assad menyatakan tidak takut mati seperti mantan penguasa Libya Moammar Khadafi, atau tergulingkan seperti mantan Presiden Mesir Husni Mubarak. Assad tetap menyalahkan Barat dan sejumlah negara Arab terkait krisis Suriah.

⁸ *Presiden Suriah Tidak Takut mati*, <http://krjogja.com/read/134956/presiden-suriah-tidak-takut-mati-seperti-khadafi.kr>, diakses pada tanggal 3 Juli 2012

B. Pokok Permasalahan :

Dari latar belakang masalah diatas dapat kita ambil suatu permasalahan umum yaitu:
“Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan presiden Bashar Al-Assad mampu mempertahankan kekuasaannya ditengah kuatnya tuntutan untuk mundur?”

C. Kerangka pemikiran

Untuk menganalisis suatu permasalahan yang muncul dari sebuah fenomena sosial yang akan dibahas termasuk yang berkaitan dengan persoalan yang muncul dalam hubungan internasional, dibutuhkan suatu alat bantu (pisau) analisis yang disebut “teori” yang berupaya menjelaskan secara umum dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dengan kata lain, berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada fenomena yang sedang terjadi.⁹ Teori sebisa mungkin dibuat untuk mengembangkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang berhubungan atau berkorelasi. Sementara suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹⁰

Konsep *power* merupakan konsep yang sering digunakan dalam menganalisis berbagai fenomena hubungan internasional. *Power* dapat dikatakan sebagai unsur utama dalam politik. Hans J. Morgenthau mendefinisikan *power* sebagai berikut:

“Bisa terdiri dari apa yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua

⁹ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES,1983). Hal.185.

¹⁰ *Ibid*, hal. 93

hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian itu), mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.¹¹”

Morgenthau mendefinisikan *power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B. *Power* politik mencakup hubungan psikologis antara elite yang menyelenggarakan kekuasaan serta mereka yang dipengaruhi atau dikendalikan oleh elite. *Power* bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.

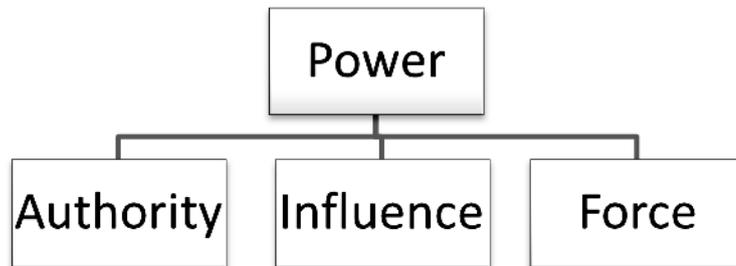
Politik bagi Morgenthau adalah *struggle for power*, yaitu perjuangan memperoleh kekuasaan. Kekuasaan (*power*) merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, dan masyarakat umum. Seseorang mempunyai kekuasaan potensial, bila ia memiliki sumber-sumber kekuasaan yaitu kekayaan, senjata, status sosial dsb. Seseorang dibidang mempunyai kekuasaan aktual, apabila ia telah menggunakan sumber-sumber tadi kedalam kegiatan politik.

Tak jauh berbeda dengan definisi *power* oleh Morgenthau, Coulombis dan Wolfe mendefinisikan *power* sebagai apa-apa saja yang bisa menciptakan dan

¹¹Hans J.Morgenthau, *Politic Among Nations*, dikutip dalam Mas'ood, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional:Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 117.

mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Disebutkan juga bahwa *power* memiliki tiga unsur penting yang terlihat dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 nsur-unsur *Power*



Sumber: Morgenthau, Hans J. *Politic Among Nation*, dikutip dalam Mas' oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Authority atau wewenang adalah sikap tunduk sukarela dari aktor B yang bisa berupa arahan atau nasihat maupun perintah.¹² *Influence* atau pengaruh diartikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi yang dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan oleh aktor A agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Sedangkan *Force* atau daya paksa dimaknai sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B untuk tercapainya tujuan politik.

Sementara Henderson (1998) menuliskan *power* adalah konsep yang sukar untuk dipahami, namun perannya sangat penting dalam hubungan internasional. *Power* adalah kemampuan seorang actor untuk membujuk atau memaksa pihak

¹² *Ibid.* Hal. 118-119.

lain. Sehingga memberikan pengendalian bagi actor tersebut. *Power* terwujud dalam dua bentuk yaitu soft and hard¹³.

Soft *Power* adalah kemampuan untuk membujuk pihak lain agar melakukan sesuatu melalui pengaruh yang dimiliki. Dalam tataran bernegara hal ini dapat terlihat pada ideology dan kebudayaan yang diikuti oleh negara lain. *Hard Power* adalah kemampuan suatu negara untuk memaksa kehendaknya melalui kekuatan militer atau ekonomi atau kombinasi keduanya (Henderson, 1998).

Dengan mendasarkan pada dikotomi *tangible-intangible*. Rourke (1986)¹⁴ menuliskan elemen dari *power*. Elemen *tangible* adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat dihitung seperti karakteristik fisik, karakteristik populasi, sumber daya alam, produk industrial, produk pertanian, kemampuan teknologi informasi dan kemampuan militer. Elemen *Intangible* adalah semua sumber daya yang dimiliki suatu negara yang tidak dapat dihitung misalnya kekuatan pemerintahan. Kekuatan rakyat, persenjataan militer dan reputasi negara tersebut.

Sebuah negara dikatakan mempunyai *national power* apabila memiliki lebih dari jumlah total populasi, bahan mentah, dan faktor-faktor kuantitatif. Potensi gabungan dari sebuah Negara, kesetiaanegaraan, fleksibilitas institusi-institusinya, bagaimana institusi tersebut beroperasi, kapasitas untuk menutupi kelemahannya: adalah beberapa dari unsur kuantitatif yang menentukan total

¹³ Conway W. Henderson, *International Relations: Conflict and Cooperation of The Turn of The 21st Century*, Singapura: Me.Graw-Hill. (1998), hal.101

¹⁴ John. T Rourke, *International Politics on The World Stages*, Hartford: University of Connecticut(1986), hal. 185.

kekuatan suatu Negara. Banyak aspek yang mempengaruhi dan berkontribusi dalam meningkatkan *national power* suatu negara. Bisa dikatakan bahwa *national power* adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu Negara atas segala sesuatu yang dimilikinya. Lebih dari aspek fisik seperti geografis dan populasi, unsur-unsur *national power* juga meliputi hal-hal yang tidak nyata, berupa kepiawaian bernegosiasi dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor yang berkontribusi bagi pondasi *national power*. Faktor-faktor tersebut adalah geografi, SDA, Populasi, teknologi, karakter dan moral nasional, pengembangan ekonomi, struktur politik, elemen ideologi, kepemimpinan, kesiapan militer dan diplomasi. Dalam penelitian ini dibatasi pada geografi, sumber daya alam, populasi dan kesiapan militer dan diplomasi.

1. Geografi

Geografi memainkan peranan dalam menentukan *power* seorang aktor. Walaupun pentingnya geografi masih menjadi perdebatan geografi bahkan hampir sangat relevan dalam menentukan potensi kekuatan Negara aktor.

2. Sumber Daya Alam

Ada 4 tingkatan yang terikat dengan hal ini, yaitu kepemilikan, eksploitasi, kontrol dan penggunaan. Seorang aktor yang memiliki kuantitas SDA yang banyak berada dalam posisi yang potensial dibandingkan dengan aktor lain yang memiliki kuantitas yang lebih sedikit. Namun sang aktor juga harus dapat mengeksploitasi SDAny, karena kuantitas SDA yang melimpah tidak akan gunanya jika tidak dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada.

3. Populasi

Populasi adalah satu faktor terpenting dalam *power*. Disini populasi bukan hanya dalam jumlah saja namun juga dari pendidikan dan keterampilan dari populasi tersebut. Peran populasi adalah menaikkan atau menurunkan kekuatan seorang aktor. Peranan ini tidak dapat dipisahkan dari parameter kekuatan lainnya seperti organisasi, kepemimpinan dan dasar industrial.

4. Kesiapan Militer

Kemampuan militer diperlukan sekali bagi potensi *power* Negara. Bahkan dalam kenyataan, beberapa analisis yang menganalisa peranan *power* dalam hubungan internasional, beranggapan bahwa kemampuan militer adalah satu-satunya faktor yang nyata dari *power* seorang aktor. Secara kuantitatif maupun kualitatif, peranan militer ini sangat dibutuhkan sebagai sebuah elemen sebuah Negara. Sebaik apa kemampuan militer untuk mempertahankan Negara? Seberapa baik militer seorang actor mempersiapkan diri sebelum perang dan selama perang perdamaian? Semua akan memberikan pengaruh bagi Negara tersebut sebagai aktor. Negara yang pasukan militernya menang dalam perang, maka akan dikenal sebagai Negara dengan kemampuan militer yang kuat, dan dikenal sebagai Negara yang kuat.

5. Diplomasi

Diplomasi dalam *National Power* sangat ditentukan oleh kualitas diplomasi yang diikuti oleh Negara. Morgenthau berpendapat bahwa kualitas diplomasi sebuah Negara memberikan arah dan bobot kepada elemen-elemen

national power yang lainnya. Diplomasi yang baik dapat membawa berbagai elemen dari *national power* untuk menghasilkan efek maksimum di atas poin-poin dalam situasi internasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan internasional.

Stephen Robbins (2007) dalam bukunya “*Organizational Behavior*” memaparkan klasifikasi kekuasaan dari French and Raven (1959) berdasarkan sumbernya yaitu kekuasaan formal dan personal. Kekuasaan Formal dapat berasal dari kemampuan individu menggunakan kekuasaan dengan memberikan ancaman (*coercive power*), mengiming-imingi imbalan (*reward power*), maupun dengan wewenang yang ia miliki (*legitimate power*).¹⁵

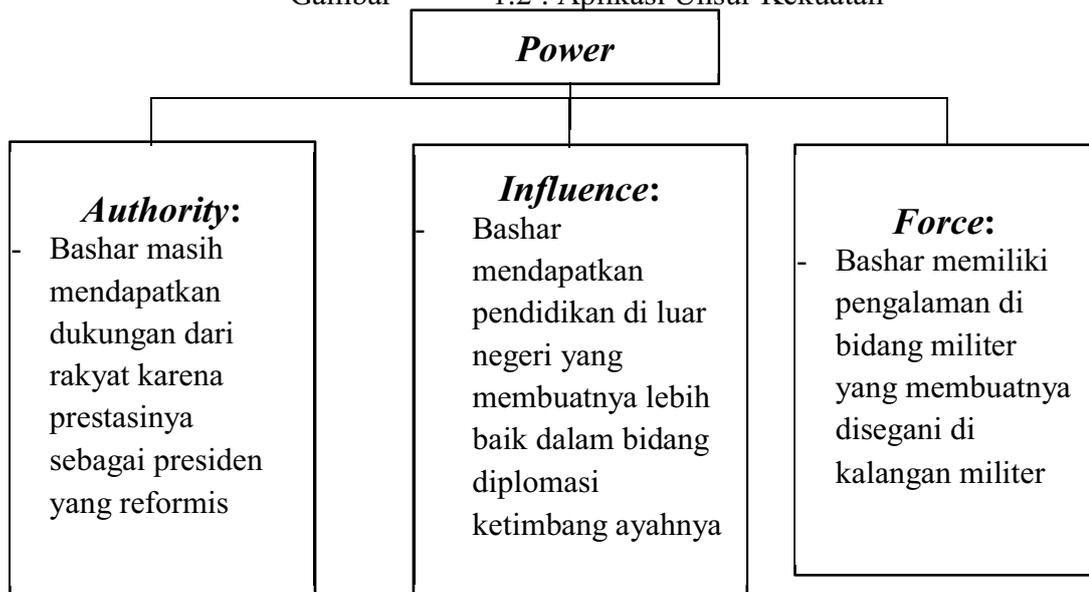
D. Aplikasi Teori

Aksi demonstrasi yang terjadi di Suriah belakangan ini adalah bentuk dari interaksi politik antara pemerintah sebagai subjek yang membuat kebijakan dengan masyarakat sebagai objek yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Ini merupakan masukan bagi pemerintah untuk kembali menelaah dan mempelajari strategi politik yang harus diambil kemudian. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pemerintahan akan berusaha sebisa mungkin untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun baik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang kasar. Begitu pula yang terjadi pada Pemerintah Suriah. Sebesar apapun reaksi dari masyarakat, pemerintah harus benar-benar

¹⁵ Imam Sholahuddin S.E, *Social/Network Power: Applying Social Capital Concept to Individual Behaviour in The Organizational Context*, diakses 1 mei 2012, http://er.library.ums.ac.id/fiksi/Social_Network_Power_Applying_Social_Capital_Concept_to_Individual_Behavior_in_the_Organizational_Context.pdf

memperhitungkan tindakannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil langkah-langkah politik dalam menangani masalah yang sedang berlangsung.

Gambar 1.2 : Aplikasi Unsur Kekuatan



Presiden Bashar Al-Assad, selaku presiden yang berkuasa di Suriah saat ini, benar-benar dituntut untuk dapat menggunakan setiap elemen *power* yang ia miliki untuk mempertahankan jabatannya yang saat ini sedang goyah. Baik dengan menggunakan pengaruhnya kepada masyarakat maupun dengan menggunakan daya paksa semaksimal mungkin agar wewenangnya terhadap masyarakat tidak terganggu.

Jika kita lihat dari segi *authority* yang dimilikinya, tidak semua warga Suriah saat ini yang menuntut Bashar untuk mundur. Bashar telah melakukan banyak perubahan positif pada masa pemerintahannya. Sebagai representasi dari generasi muda yang lebih modern, Bashar melakukan perubahan yang radikal dari

masa kepemimpinan ayahnya. Ia melakukan liberalisasi ekonomi, mengupayakan pemberantasan korupsi dan membuka investasi asing dengan mengedepankan sektor publik¹⁶. Diawal kepemimpinannya, ia mendorong masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik yang konstruktif dimana hal ini sangat dilarang pada masa kepemimpinan ayahnya. Hal inilah yang membuat ia disenangi oleh rakyatnya karena keseriusannya berjuang menghadapi sistem pemerintahan yang merupakan warisan dari ayahnya dan menjalankannya sepenuh hati.

Dari segi *Influence*, Bashar memiliki kelebihan dari ayahnya. Pengalamannya semasa menuntut ilmu di London membuatnya lebih moderat ketimbang Hafeez. Hubungan baik dengan beberapa negara sahabat seperti Iran, Rusia dan China terus dibangun Bashar. Bashar melakukan kunjungan ke Moscow pada tahun 2005 untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara yang sempat mengalami kemunduran. Pada kesempatan itu, Rusia menghapus hutang luar negeri Suriah sebanyak 73 persen senilai 13,4 dollar Amerika¹⁷. Bashar merasa sangat terbantu ketika Rusia beserta China mengeluarkan hak veto mereka dalam resolusi yang diajukan Liga Arab kepada Dewan Keamanan PBB.

Hubungan baik dengan Iran pun kembali diperkuat pada masa kepemimpinan Bashar. Menteri Pertahanan kedua negara menandatangani perjanjian untuk kerjasama militer pada tahun 2006. Iran telah memberikan bantuan keuangan senilai lebih dari 1 miliar US dollar atau Rp. 8,985 Triliun guna

¹⁶ Raymond Hinnebusch, *Syria: From 'authoritarian upgrading' to revolution*, diakses pada 5 Juli 2012 melalui situs: http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/2012/88_1/88_1hinnebusch.pdf

¹⁷ Mark N. Katz, *PUTIN'S FOREIGN POLICY TOWARD SYRIA*, hal.2 diakses melalui <http://meria.idc.ac.il/journal/2006/issue1/jv10no1a4.html>

membantu Suriah dalam menghadapi sanksi Internasional¹⁸. Pemberian dana tersebut akan digunakan untuk membantu mengatasi embargo minyak terhadap Suriah termasuk pembatasan penerbangan dan sanksi terhadap bank sentral serta melakukan transaksi perdagangan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengalamannya dibidang militer membuat Bashar menjadi presiden yang disegani baik dikalangan sipil maupun militer. Bashar telah dipersiapkan oleh sang ayah untuk ikut ke dalam militer karena tentara militer memiliki peranan penting dalam perpolitikan di Suriah. Sebelum menjabat sebagai Presiden, Bashar mendapatkan pangkat sebagai Kolonel pada tahun 1999. Tentara Suriah memiliki kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Fawas Gerges, profesor politik Timur Tengah di London School of Economics, mengatakan Suriah adalah salah satu negara Timur Tengah yang paling tidak mungkin dihantam protes karena struktur kekuasaannya. Kesetiaan tentara Suriah berbeda dengan di Tunisia, di mana militer dengan cepat menjadi salah satu pendukung utama penggulingan presiden, dan di Mesir, di mana tentara tidak berpihak¹⁹. Bantuan senjata dari beberapa negara sahabat seperti Rusia, China dan Iran semakin menambah kekuatan militer pemerintah Bashar untuk menghadapi serangan tentara oposisi Suriah yang juga mendapat bantuan dari Barat.

¹⁸ Kharisa Ferida, *Dokumen Kesepakatan Iran-Suriah Bocor*, diakses pada tanggal 23 April 2012 melalui: <http://international.okezone.com/read/2012/02/12/412/574111/dokumen-kesepakatan-iran-suriah-bocor>

¹⁹ *Negeri Sunyi bernama Suriah*, diakses pada tanggal 15 Mei 2012 melalui situs: <http://chairulakmad.wordpress.com/2011/03/14/negeri-sunyi-bernama-suriah/>

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas serta mempertimbangkan kerangka dasar teori yang digunakan, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sementara bahwa ada beberapa faktor yang menjadi alasan Pemerintah Suriah (Rezim Al-Assad) mampu mempertahankan kekuasaannya ditengah kuatnya tuntutan untuk mundur, yaitu:

1. Kesiapan militer Suriah mampu mempertahankan keamanan dalam negeri dan pertahanan dari intervensi asing.
2. Bashar Al-Assad memiliki kemampuan diplomasi yang baik sehingga ia mampu mendapatkan dukungan dari Rusia, China dan Iran.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar yaitu:

1. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang membuat Presiden Bashar Al-Assad mampu mempertahankan kekuasaannya ditengah kuatnya tuntutan untuk mundur.
2. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata I di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan dengan ranah jangkauan yang luas. Data dihimpun dan disajikan dalam bentuk verbal dan menekankan pada konsep kontekstual. Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (library research). Dengan studi kepustakaan ini, penulis berharap nantinya bisa menemukan data – data dan fakta – fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai buku, literatur, situs – situs internet dan sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Bila pokok permasalahan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan informasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Bagi penulis sendiri, penegasan batasan ini akan menjadi pedoman kerja. Penegasan ini berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya kericuhan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Untuk itu data dalam penulisan ini dibatasi sejak awal mula terjadinya kericuhan di Suriah pada tahun 2011 serta perkembangan konflik tersebut sampai akhir bulan Agustus 2012, tetapi untuk melatar belakangi ataupun memperjelas bahasan tidak menutup kemungkinan penulis menambah bahan dari sebelum maupun sesudah periode tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Adapaun sistematika penulisan terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Membahas mengenai sejarah negara Suriah serta pemerintahan Suriah sebelum masa Bashar Al-Assad, beberapa kudeta yang terjadi sebelum rezim Assad serta wilayah geografis, populasi, politik dalam dan luar negeri Suriah sebelum terjadinya gejolak revolusi.

Bab III Membahas mengenai revolusi yang terjadi di Timur Tengah, tuntutan masyarakat Suriah terhadap pemerintahan Assad dan tuntutan luar negeri terhadap rezim Assad. Bab IV membahas kemampuan presiden Bashar Al-Assad dalam mempertahankan kekuasaannya di tengah kuatnya tuntutan untuk mundur.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.